

**Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah
(APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas
Publik Di DPRD Kota Palembang.**



Skripsi Oleh :
MUTTAQIN
01031181419048
Akuntansi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana ekonomi

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2018

**Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas
Publik Di DPRD Kota Palembang.**

Disusun oleh:


Nama : Muttaqin
NIM : 01031181419048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
BidangKajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.


Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Tanggal: 25 Juni 2018


Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001

Tanggal: 21 Mei 2018


Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran
Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas
Publik Di DPRD Kota Palembang.**

Disusun oleh:

Nama : Muttaqin
NIM : 01031181419048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 23 Juli 2018 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 23 Juli 2018

Ketua



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001

Anggota



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Anggota



DR. Yulia Saftiana, SE, M.SI, AK
NIP. 19670701 199203 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muttaqin
NIM : 01031181419048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
BidangKajian/Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas Publik Di DPRD Kota Palembang.

Pembimbing :

Ketua : Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
Anggota 1 : Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
Anggota 2 : DR. Yulia Saftiana, SE,M.SI,AK

Tanggal Ujian : 23 Juli 2018

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 23 Juli 2018
Pembuat Pernyataan



Muttaqin
NIM.01031181419048

MOTTO:

“SEMUA TERASA TIDAK MUNGKIN, HINGGA KAU SELESAI
MELAKUKANNYA”
(NELSON MANDELA)

Jadilah pemimpin didunia ini dengan cara melindungi bukan untuk dilindungi.

Jika mendapati tertawa yang berlebihan, berjaga-jagalah mendapati tangisan yang keras layaknya siang dapat dengan mudah berubah menjadi malam.

~~ ~~

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

- *Big Daddy* dan *Big Mom*
- Sahabat Yang Mengakuiku
- Dimaafkan
- Dimaklumi
- Dan Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas Publik DI DPRD Kota Palembang**”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas Publik DI DPRD Kota Palembang. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini menjadi sebuah karya yang bermanfaat bagi pembaca.

Inderalaya, 23 Juli 2018



Muttaqin

NIM. 01031181419048

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwah, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak, CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Oma selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Eka selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan pengarahan dan bantuan selama melaksanakan studi.
6. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Seluruh dosen di Jurusan Akuntansi maupun di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu kelancaran penulis dalam hal administrasi.
9. Bapak Pomi Wijaya selaku anggota DPRD kota Palembang yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Alm. Om Maman yang sudah membantu untuk memberikan kelancaran dalam berkomunikasi kepada anggota dewan DPRD.
11. Papa dan Mama yang telah memberikan nasihat, dukungan moral maupun materil, dan doa serta menjadi motivasi utama sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan baik.
12. Sahabat – sahabatku di EGAP (wahyu, al, ginda, jerry, kinong, doni, allia, weni, sol, lita, desya, dije, feggy, dan kak nissa) yang telah memberikan semangat, waktu, dan canda tawa kepada saya sejak saya masuk dalam perkuliahan.

13. Sahabat – sahabatku di LK (wahyu, alep, ginda, pajrin, kinong, bowok, lutfi, dodu, tiok, jerry) serta teman – teman seangkatan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih telah memberikan semangat, waktu, dan canda tawa kepada saya sejak saya masuk dalam perkuliahan.
14. Wahyu, alif, ginda, pajrin, imam yang telah banyak membantu penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
15. Serta semua pihak-pihak yang telah mendukung skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semuanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 23 Juli 2018



Penulis,

Muttaqin

NIM. 01031181419048

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Mahasiswa : Muttaqin
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 08-07-1996
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Rumah : Jl. Gersik Lr. Kangkung RT. 30 No. 1420
Kode Pos : 30113
Alamat Email : muttaqin528@yahoo.com
Nomor Handphone : 085367850920
Pendidikan Formal
TK : TK Nurul Iman
SD : SD Negeri 177 Palembang
SMP : SMP Negeri 06 Palembang
SMA : SMA Bina Warga I
Riwayat Organisasi : Anggota IMA FE
Prestasi : Juara I Kelas 11

SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstraksi skripsi dari mahasiswa

Nama : Muttaqin

NIM : 01031181419048

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tensesnya* dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.

Inderalaya, 23 Juli 2018

Pembimbing Skripsi :



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRAK

Pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang

Oleh:

Muttaqin;

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak;

Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas public di DPRD kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner dengan subyek 23 anggota DPRD kota Palembang, hasilnya menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran yang diperkuat dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik memiliki pengaruh yang negatif dalam melakukan pengawasan keuangan daerah yang efektif.

Kata Kunci : Anggota Dewan, Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran, Akuntabilitas Publik, Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah.

Ketua,



Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001

Anggota,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi,



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

ABSTRACT

The influence of board members' knowledge about the budget on the effectiveness of local financial oversight (APBD) with the variable of moderating public accountability in the DPRD of Palembang

By:

Muttaqin;

Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak;

Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak

The purpose of this study aims to examine how board members' knowledge about budgets affect the effectiveness of local financial oversight (APBD) with the variables moderating public accountability in the DPRD of Palembang. This study uses quantitative methods, data collected by distributing questionnaires with the subject of 23 members of the DPRD of Palembang city, the results indicate that based on board members' knowledge of budgets reinforced by moderating variables of public accountability can have a negative effect on effective regional financial oversight.

Key Words : Council Member, Knowledge About Budget, Public Accountability, Effectiveness Of Local Financial Supervision.

Head,



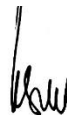
Hj. Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19640903 199403 2 001

Member,



Eka Meirawati, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690525 199603 2 001

*Acknowledge by,
Head of Accounting Department*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA
NIP. 197303171997031002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
SURAT PERNYATAAN ABSTRAKSI	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Konsep Anggaran Sektor Publik	10
2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik	11
2.1.3 Konsep Penyusunan Anggaran Sektor Publik	12
2.1.4 Fungsi DPRD Sebagai Pengawas Keuangan	13
2.1.5 Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	15
2.1.5.1 Efektivitas	15
2.1.5.2 Konsep Pengawasan	16
2.1.5.3 Tujuan Pengawasan	16
2.1.5.4 Jenis Pengawasan	17
2.1.5.4.1 Pengawasan Preventif	17
2.1.5.4.2 Pengawasan Represif	18

2.1.5.5	Keuangan Daerah	19
2.1.6	Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran.....	20
2.1.6.1	Pengertian Pengetahuan.....	20
2.1.6.2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	21
2.1.7	Akuntabilitas Publik	22
2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
2.3	Kerangka Pemikiran	26
2.4	Hipotesis	26
2.4.1	Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	26
2.4.2	Pengaruh Akuntabilitas Publik Atas Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1.	Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2.	Rancangan Penelitian	29
3.3.	Jenis Dan Sumber Data	29
3.4.	Teknik Pengumpulan Data	30
3.5.	Populasi Dan Sampel.....	30
3.6.	Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional	31
3.6.1.	Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	31
3.6.2.	Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran.....	32
3.6.3.	Akuntabilitas Publik	33
3.7.	Teknik Analisis.....	35
3.7.1.	Uji Kualitas Data	35
3.7.1.1.	Uji Validitas.....	35
3.7.1.2.	Uji Reliabilitas.....	36
3.7.2.	Uji Asumsi Klasik	33
3.7.2.1	Uji Normalitas	33
3.7.3.	Teknik Analisis Data	37
3.7.4.	Uji Hipotesis.....	38
3.7.4.1.	Uji Pengaruh Parsial	38
3.7.5.	Koefisien Determinasi (R ²).....	39

BAB IV DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.	Data Penelitian.....	40
4.1.1.	Objek Penelitian	40
4.1.2.	Gambaran Umum Responden.....	40
4.1.3.	Uji Kualitas Data	41
4.1.3.1.	Uji Validitas.....	42
4.1.3.2.	Uji Reliabilitas.....	44
4.2.	Hasil Penelitian.....	45
4.2.1.	Analisis Deskriptif	45
4.2.1.1.	Variabel Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran	45
4.2.1.2.	Variabel Akuntabilitas Publik	47
4.2.1.3.	Variabel Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	50
4.3.	Hasil Uji Normalitas	52
4.4.	Hasil Analisis Data	53
4.4.1.	Moderated Regression Analisis (MRA).....	53

4.4.2.	Analisis Uji Parsial t.....	54
4.4.3.	Analisis Koefisien Determinasi	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan.....	61
5.2.	Keterbatasan Penelitian	62
5.2.	Saran	62
Daftar Pustaka		63
Lampiran		67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.6.1	Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah.....	32
Table 3.6.2	Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran	33
Table 3.6.3	Akuntabilitas Publik.....	34
Tabel 4.1	Gambaran Umum Responden	40
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas.....	41
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas.....	44
Tabel 4.4	Rangkuman Skor Variabel Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran	45
Tabel 4.5	Rangkuman Skor Variabel Akuntabilitas Publik.....	47
Tabel 4.6	Rangkuman Skor Variabel Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah	49
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4.8	Hasil Uji Simultan (Uji t).....	53
Table 4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
Tabel 4.10	Ringkasan Hasil Hipotesis	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	26
------------	-------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Pengambilan Data	67
Lampiran 2	Kuisisioner.....	68
Lampiran 3	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah.....	73
Lampiran 4	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran.....	74
Lampiran 5	Hasil Uji Validitas Dan Reliabilitas Variabel Akuntabilitas Publik	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan suatu harapan bagi tercipta dan terlaksananya keadilan, demokrasi, dan transparansi kehidupan sektor publik. Otonomi daerah mempunyai tujuan yaitu untuk efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan seluruh aspek kehidupan dimasyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan undang-undang dan peran serta masyarakat. Pengawasan keuangan daerah (APBD) secara efektif hanya dapat dilakukan oleh DPRD apabila anggotanya terdiri dari SDM yang berkualitas tinggi. Masalah utama yang dihadapi daerah adalah kurangnya sumberdaya manusia daerah yang berkualitas sehingga fenomena yang ada lemahnya pengawasan terhadap keuangan daerah (APBD) (Jufri Dharma dan Ali Fikri : 2012).

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dilakukan oleh DPRD. Pada proses penyusunan anggaran tidak bisa terlepas dari mekanisme otonomi daerah yang termasuk dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut menandai era baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, yaitu pelaksanaan desentralisasi untuk mewujudkan otonomi daerah. Salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

dan desentralisasi adalah masalah keuangan daerah dan anggaran daerah (APBD) (Winarna, 2007 dalam Arief Kurniawan, 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1. Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2. Dewan berwenang memerintah pemeriksaan eksternal di daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. Artinya, bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus mampu merefleksikan tuntutan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang dimaksudkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Terciptanya undang-undang otonomi daerah adalah sebagai bentuk dari harapan akan adanya sebuah pengolahan suatu kinerja dan keuangan yang ekonomis, efisien dan efektif (Arief Kurniawan, 2012).

Pengawasan keuangan daerah oleh DPRD harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena dalam era otonomi, DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD), maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Untuk memperkuat fungsi pengawasan, DPRD bisa berfungsi sebagai pengawas independen untuk mengawasi jalannya suatu lembaga publik. Peran pemerintah pada saat penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah adalah menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah yang kemudian diusulkan kepada dewan untuk mendapatkan persetujuan. Untuk itu pemerintah harus benar-benar serius menumbuhkan saling pengertian dan

kepercayaan dewan dalam menghadapi kendala-kendala yang sedang dan akan dihadapi oleh pemerintah daerah (Hari Utomo, 2011).

Peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah adalah digunakannya hak-hak DPRD dalam proses mekanisme APBD baik dalam penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD. Hak-hak yang digunakan DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara (Dewi Kartikasari, 2012).

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan

pemerintah, kebijakan publik dan terkhusus terkait anggaran yang akan digunakan.

Faktor yang diduga mempengaruhi pengawasan adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan adanya pemoderasi akuntabilitas publik. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran akan sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan dikarenakan menjadi sumber pokok utama untuk mengatur keuangan yang ada di pemerintahan guna mencapai tujuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Adapun menurut Halim dan Iqbal (2012) dalam Fitri Santi Maisarah (2014) mengemukakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen layanannya. Akuntabilitas publik merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.

Peranan anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sangat besar dan memiliki nilai yang strategis untuk dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun pada kenyataannya masih terdapat permasalahan dan kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif, yaitu masih rendahnya peran anggota DPRD dalam keseluruhan proses anggaran (APBD), baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan maupun

pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007 dalam Dewi Kartikasari, 2012).

Dari APBD kota Palembang yang disetujui untuk tahun 2018 adalah sebesar 2.940.000.000.000,- rupiah, untuk anggaran pendidikan sebesar dari total anggaran belanja, yaitu 795.682.788.995,69,- rupiah, disusul pembangunan infrastruktur sebesar 424.740.000.000,- rupiah, kesehatan sebesar 383.190.000.000,- rupiah, dan masih banyak lagi biaya yang akan dikeluarkan untuk tujuan membangun kesejahteraan rakyat kota. Dengan dana yang cukup besar ini diperlukan pengawasan yang efektif dalam mengelola keuangan daerah untuk memaksimalkan Pemkot Palembang dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2018 ini anggota DPRD memiliki tugas yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan keuangan daerah terkait penggunaan dana anggaran yang akan diprioritaskan untuk perbaikan SD dan SMP. Sementara untuk bidang kesehatan tetap memprioritaskan pelayanan di Puskesmas yang ada di setiap kecamatan begitupun dengan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Adanya keterlibatan dalam pengawasan keuangan daerah yang ditangani oleh DPRD kota Palembang adalah tugas yang cukup berat dikarenakan berbagai tuntutan dari penilaian pihak lain terhadap kondisi tata kelola pemerintahan yang ada di kota Palembang itu sendiri. Di dalam pengawasan keuangan daerah itu sendiri, dapat kita lihat bahwa sejauh mana tingkat *good governance* yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota Palembang terkhusus para anggota dewan. Dengan tercapainya tingkat *good governance* maka tentu baru bisa dibilang efektif dalam melakukan suatu

kegiatan. Tidak terkecuali dalam melakukan pengawasan keuangan daerah itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti ada tidaknya pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik yang berada di DPRD kota Palembang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan ditujukan untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai tentang **“Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Pemoderasi Akuntabilitas Publik Di DPRD Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) di DPRD kota Palembang.
2. Untuk menguji pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik di DPRD kota Palembang.
2. Bagi DPRD, memberikan masukan untuk membantu peran DPRD yang berfungsi sebagai pengawasan, dalam melaksanakan otonomi daerah dan dalam rangka mewujudkan *good governance*.
3. Bagi akademis, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik (ASP), serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas secara singkat dan jelas tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini membahas mengenai landasan teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini yaitu mengenai pengetahuan anggota dewan tentang anggaran, akuntabilitas publik, dan efektivitas pengawasan keuangan daerah. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis dari penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini khusus membahas mengenai rancangan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, serta teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini.

BAB IV: DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai data penelitian, uji kualitas data yang terdiri hasil uji validitas dan reliabilitas, hasil penelitian yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis melalui program pengolah data SPSS 23, dan terakhir pembahasan yang menjelaskan bagaimana hubungan antara

variabel independen terhadap variabel dependen pada penelitian ini serta seberapa kuat hubungan tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran bagi penelitian selanjutnya dan Dinas terkait dalam usaha meningkatkan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap efektivitas pengawasan keuangan daerah dengan variabel pemoderasi akuntabilitas publik.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pemerintah Daerah-Manajemen*. Hal : 165. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ashari, Purbayu Budi Santoso. 2005. *Analisis statistik dengan Microsoft excel dan SPSS*. Yogyakarta.
- Darma Jufri dan Fikri Ali. 2012. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variable Moderating.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM ___ SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- <http://amperanews.com/berita/detail/apbd-kota-palembang-2018-disetujui-28-triliun> (26, Februari 2018)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik_\(12](https://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Sektor_Publik_(12), Februari 2018)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_\(11](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_(11), Februari 2018)
- <http://www.palembang.go.id/berita/413/pemkot-prioritaskan-anggaran-perbaiki-sd-dan-smp-tahun-2018> (10, Maret 2018)
- Handoko, Tani, 2013, *Manajemen (Edisi Dua)*, Yogyakarta, BPFY-Yogyakarta
- Juliastuti Ayu. 2013. Pengaruh akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public terhadap hubunganpengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Universitas Negeri Padang.
- Kartikasari Dewi. 2012. Pengaruh proporsional background, political background, pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Universitas Negeri Semarang.
- Kharimah, Firda. 2017. Pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, pemahaman regulasi dan pengalaman terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah. Hal:805. Pekanbaru.
- Kurniawan Arief. 2012. Pengaruh partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan public, akuntabilitas public dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan APBD. Universitas MuhammadiyahSurakarta.
- Maisarah, Fitri Santi. 2014. Pengaruh akuntabilitas public, partisipasi masyarakat transparansi kebijakan public, dan APBD berbasis kinerja terhadap kualitas anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD) di kota Banda Aceh. Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh.

- Mahmudi, 2007, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta, Andi Offset
- Marta Yovita, Farah. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Hal : 29-30. Undip. Semarang.
- Pangkey, Imanuel dan Pinatik, Sherly. 2015. Analisis efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi utara. Hal : 35. Manado.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Suharso, Puguh. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*.
- Purwanti Ira dan Hudiwinarsih Gunasti. 2012. Persepsi Manajer Atas Informasi Akuntansi Keuangan dan Pengaruhnya pada Keberhasilan Mengelola Usaha Kecil dan Menengah Di Surabaya. STIE Perbanas Surabaya.
- Putra, Deki. 2013. Pengaruh Akuntabilitas public dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial satuan kerja perangkat daerah. Universitas Negeri Padang.
- Putriana, R. 2014. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, dan prinsip good governance sebagai variable pemoderating. Hal : 30 : 32. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Riki Maskudri. 2010. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Publik terhadap Kinerja Organisasi Layanan Publik. Unp.
- Rusdianto, Hutomo dan Chanafi Ibrahim. 2016. Pengaruh Produk Syariah Terhadap Minat Menabung dengan Persepsi Masyarakat sebagai Variabel Moderating di Pati. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4, No 1, Juni 2016, ISSN 2355-0228.
- Setyawati, Yuni. 2010. Pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan public sebagai variable pemoderasi. Hal : 31. Surakarta.
- Siagian. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sugiyono. 2007. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Hal: 194. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- Utomo Hari. 2011. Determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang
anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).
Universitas Diponegoro Semarang.
- Yudhi Fahrianta, Riswan dan Carolina, Viani. 2012. Analisis efisiensi
anggaran belanja dinas Pendidikan kabupaten Kapuas. Hal : 59.
Banjarmasin.